



Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin, IPM dan UMR Terhadap TPT di Provinsi Sumatera Utara Periode 2011 – 2020

Muhammad Abdi

Universitas Negeri Medan

Brigita Zai

Universitas Negeri Medan

Fahmi Apriyansyah Siregar

Universitas Negeri Medan

Runggu Sihombing

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jln. William Iskandar, Pasar V Medan Estate

Korespondensi penulis: mabdi7346@gmail.com

Abstrak. *The high level of unemployment in North Sumatra is a serious challenge that requires attention and appropriate solutions, especially considering the social and economic impact it has on society. This research aims to analyze the influence of the percentage of poor people, the Human Development Index (HDI), and the Regional Minimum Wage (UMR) on the Open Unemployment Rate (TPT) in North Sumatra. This research adopts a quantitative approach using the literature study collection method. Data obtained from the Central Statistics Agency (BPS). These funds are time series data for the 2011-2020 period. Researchers applied quantitative methods in this research. Data were analyzed using multiple linear regression tests using SPSS 26 software. The multiple linear regression tests used by researchers included normality tests and hypothesis tests. According to research results, the number of poor people, the Human Development Index, and the Regional Minimum Wage together (simultaneously) influence the Open Unemployment Rate (TPT). Partially, the number of poor people has a positive and significant effect, the Human Development Index (HDI) has a negative and significant effect, and the Regional Minimum Wage (UMR) has a positive and significant effect on the open unemployment rate (TPT) in North Sumatra in 2011-2020.*

Keywords: *Number of Poor Population, Human Development Index, Regional Minimum Wage, Open Unemployment Rate.*

Abstrak. Tingginya tingkat pengangguran di Sumatera Utara menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan solusi yang tepat, terutama mengingat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persentase penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan. Data diperoleh dari sumber Badan Pusat Statistik (BPS). Dana tersebut merupakan data runtun waktu (*time series*) periode 2011-2020. Peneliti menerapkan metode kuantitatif dalam penelitian ini. Data dianalisis dengan uji regresi linier berganda menggunakan *software* SPSS 26. Uji regresi linier berganda yang digunakan peneliti meliputi uji normalitas dan uji hipotesis. Menurut hasil penelitian, jumlah penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Secara parsial jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan, dan Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Utara Tahun 2011-2020.

Kata Kunci: *Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional, Tingkat Pengangguran Terbuka.*

PENDAHULUAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator krusial dalam menilai kondisi ekonomi suatu wilayah. TPT menggambarkan persentase angkatan kerja yang secara aktif

mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya. Angka TPT yang tinggi dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam perekonomian, seperti ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, kekurangan keterampilan di pasar kerja, atau hambatan struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Di Provinsi Sumatera Utara, isu TPT semakin menjadi perhatian serius, terutama mengingat kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar.

Masalah pengangguran terbuka di Sumatera Utara mencerminkan kerumitan tantangan yang dihadapi masyarakat. Meski wilayah ini memiliki sektor ekonomi potensial seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, masih banyak orang yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Salah satu faktor utama yang memicu fenomena ini adalah ketidaksesuaian antara keterampilan pencari kerja dan kebutuhan dunia industri. Banyak lulusan perguruan tinggi tidak memiliki keahlian yang relevan dengan permintaan pasar kerja, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai.

Selain ketimpangan keterampilan, faktor demografi juga menjadi penyebab tingginya TPT. Dengan populasi yang besar, Sumatera Utara memiliki jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahun. Namun, peningkatan jumlah lapangan kerja tidak seimbang dengan banyaknya pencari kerja. Akibatnya, persaingan di antara pencari kerja menjadi sangat ketat, yang pada akhirnya mendorong naiknya tingkat pengangguran. Di Provinsi Sumatera Utara, fenomena tingkat pengangguran terbuka seringkali dikaitkan dengan berbagai aspek sosial dan ekonomi, seperti jumlah penduduk kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta Upah Minimum Regional (UMR). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan TPT di Sumatera Utara periode 2011-2020, berikut adalah grafik yang menunjukkan tingkat pengangguran terbuka.

Grafik 1. Perkembangan TPT di Sumatera Utara Periode 2011 – 2020



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan grafik diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia menunjukkan pola yang berfluktuasi selama periode 2011-2020. Pada tahun 2011, TPT tercatat sebesar 6,37% dan sedikit menurun menjadi 6,20% pada tahun 2012. Namun, angka ini kembali meningkat ke 6,53% pada tahun 2013 sebelum turun lagi ke 6,23% di tahun 2014. Tahun 2015 mencatat kenaikan menjadi 6,71%, tetapi kemudian terjadi penurunan signifikan ke 5,48% pada

tahun 2016. Selama tiga tahun berikutnya, dari 2017 hingga 2019, TPT terus menurun secara konsisten dengan penurunan tahunan berkisar antara 0,15% hingga 0,20%, hingga mencapai 5,41% pada tahun 2019. Akan tetapi, pada tahun 2020 terjadi kenaikan tajam sebesar 1,5%, sehingga TPT meningkat menjadi 6,91%. Lonjakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, yang membuat banyak sektor usaha harus mengurangi atau menghentikan aktivitas operasionalnya.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat pengangguran adalah persentase penduduk miskin. Penduduk miskin sering kali memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan keterbatasan keterampilan, sehingga sulit untuk bersaing di pasar tenaga kerja formal. Ketiadaan pendidikan yang memadai juga dapat menyebabkan mereka hanya mampu mengakses pekerjaan di sektor informal yang tidak stabil dan berpenghasilan rendah. Semakin besar jumlah penduduk miskin, semakin tinggi potensi terjadinya pengangguran. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses kelompok tersebut terhadap pendidikan dan pelatihan kerja yang dibutuhkan untuk bersaing di pasar tenaga kerja (Bangun, 2020). Situasi ini menciptakan siklus kemiskinan, di mana pendapatan yang rendah menghalangi investasi dalam pendidikan dan pelatihan, sehingga memperpanjang ketidakmampuan mereka untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Selain itu, kemiskinan dapat berdampak pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Mayoritas orang miskin memiliki daya beli yang rendah, yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, jumlah orang miskin dapat meningkatkan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan program bantuan sosial seperti subsidi makanan, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan. Akibatnya, sumber daya yang seharusnya dialokasikan oleh pemerintah untuk pembangunan ekonomi dalam jangka panjang dibagi secara tidak proporsional. Hal ini sesuai dengan Teori Lingkaran Kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*) dari Nurkse (1953) menjelaskan bahwa kemiskinan dapat menyebabkan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Ketika pendapatan masyarakat rendah, permintaan terhadap barang dan jasa juga rendah, sehingga mengurangi insentif untuk investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini yang dapat menyebabkan peningkatan pengangguran.

Keterbatasan ekonomi yang dihadapi penduduk miskin secara langsung berdampak pada rendahnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Minimnya akses pendidikan dan pelayanan kesehatan membentuk siklus kemiskinan yang berkelanjutan, di mana generasi penerus menghadapi tantangan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, yang selanjutnya direfleksikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan tiga aspek utama kesejahteraan manusia, yaitu kesehatan (diukur melalui angka harapan hidup), pendidikan (diukur melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan). Peningkatan IPM diharapkan mampu menurunkan angka pengangguran, karena individu yang lebih sehat dan berpendidikan biasanya memiliki kesempatan kerja yang lebih tinggi (Putra et al., 2018). Selanjutnya, Sutikno et al. menyatakan bahwa aspek-aspek yang memengaruhi IPM, seperti kesehatan dan pendidikan, berperan penting dalam menurunkan tingkat pengangguran (Sutikno et al., 2017). Hal ini sesuai dengan Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) dari Schultz (1961) dan Becker (1964) yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan pengangguran.

Di Sumatera Utara, variasi IPM antarwilayah menjadi tantangan tersendiri. Daerah perkotaan cenderung memiliki IPM yang lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan karena akses

terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi lebih tersedia. Sebaliknya, daerah pedesaan sering kali tertinggal karena infrastruktur yang kurang memadai dan terbatasnya sumber daya untuk mendukung pendidikan dan kesehatan. Ketimpangan ini perlu diatasi untuk memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Kualitas sumber daya manusia, yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), memiliki keterkaitan yang kuat dengan dinamika Upah Minimum Regional (UMR). Tingkat pendidikan, kesehatan, dan kondisi ekonomi yang rendah berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja. Hal ini kemudian memengaruhi daya tawar mereka dalam penetapan upah standar serta peluang kerja yang tersedia. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan UMR dapat berdampak pada penurunan tingkat pengangguran, karena mendorong pekerja untuk mencari peluang kerja yang lebih baik dan memotivasi pengusaha untuk meningkatkan efisiensi kerja (Rahakbauw et al., 2017). Namun, di sisi lain, jika UMR ditetapkan terlalu tinggi, pengusaha mungkin mengurangi jumlah tenaga kerja atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang justru dapat meningkatkan angka pengangguran (Bintang & Woyanti, 2018).

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mankiw yang menyatakan bahwa upah senantiasa menyesuaikan diri demi terciptanya keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Teori ini menyatakan bahwa kenaikan upah dapat menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga tingkat pengangguran meningkat akibat tingginya biaya operasional. Sebaliknya, ketika upah rendah, perusahaan cenderung mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja.

Berdasarkan fenomena dan teori yang telah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara periode 2011-2020.

KAJIAN TEORI

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan persentase angkatan kerja yang tidak bekerja meskipun sedang aktif mencari pekerjaan. Sukirno (2016) berpendapat bahwa TPT menggambarkan efisiensi pasar tenaga kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Dalam konteks Sumatera Utara, TPT menjadi indikator penting untuk menilai dinamika pasar tenaga kerja, khususnya terkait dengan kesenjangan keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri (skill mismatch).

Menurut Okun (1962), ada hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran, yang dikenal dengan **Okun's Law**. Ketika ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan cenderung meningkat, sehingga pengangguran menurun. Sebaliknya, teori pasar tenaga kerja tersegmentasi yang diajukan oleh Doeringer dan Piore (1971) menyatakan bahwa pasar kerja terbagi menjadi sektor formal dan informal. Ketidakseimbangan antara kedua sektor ini seringkali menyebabkan pengangguran struktural, terutama bagi tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan permintaan pasar.

Ciri utama dari TPT adalah fokusnya pada angkatan kerja usia produktif (15–64 tahun) yang aktif mencari pekerjaan, sehingga menggambarkan tantangan ketenagakerjaan yang ada di suatu wilayah. Beberapa faktor yang memengaruhi TPT adalah ketidakcocokan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan ketenagakerjaan. Ketidaksiharian antara tingkat pendidikan tenaga kerja dan permintaan pasar sering menjadi

penyebab utama pengangguran, sementara pertumbuhan ekonomi yang lambat menghambat terciptanya lapangan pekerjaan baru (Kuncoro, 2015).

UMR, jumlah penduduk, dan TPT memiliki keterkaitan yang erat dalam dinamika perekonomian regional. Kenaikan UMR yang tidak diimbangi dengan produktivitas yang lebih tinggi dapat meningkatkan TPT, seperti yang dijelaskan oleh Mankiw (2003). Selain itu, pertumbuhan jumlah penduduk yang cepat tanpa disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang cukup dapat memperburuk pasar tenaga kerja, sesuai dengan teori Malthus (1798). Namun, jika diterapkan dengan tepat, peningkatan UMR dapat memberikan dampak positif jangka panjang dengan mendorong peningkatan daya beli dan konsumsi masyarakat, sebagaimana teori Keynes (1936).

Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah faktor penting dalam analisis ekonomi regional, yang mengukur total individu yang tinggal di suatu wilayah pada periode tertentu. Taufik (2019) menjelaskan bahwa dinamika jumlah penduduk termasuk faktor kelahiran, kematian, dan migrasi dapat memengaruhi komposisi tenaga kerja serta permintaan agregat dalam perekonomian.

Teori Malthus (1798) menyatakan bahwa jika pertumbuhan jumlah penduduk melebihi laju produksi, akan terjadi tekanan terhadap sumber daya, seperti tanah dan pangan, yang bisa menurunkan standar hidup masyarakat. Fenomena ini relevan di wilayah seperti Sumatera Utara, di mana pertumbuhan penduduk yang pesat tidak selalu diimbangi dengan penyerapan lapangan kerja. Di sisi lain, Todaro (2006) menyatakan bahwa urbanisasi dan migrasi dari desa ke kota seringkali menyebabkan ketidakseimbangan dalam penyerapan tenaga kerja, karena kota-kota besar tidak selalu mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang datang.

Ciri khas dari jumlah penduduk adalah sifatnya yang terus berubah, distribusinya yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja. Urbanisasi menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi peningkatan jumlah penduduk di daerah perkotaan, yang pada gilirannya menciptakan tekanan terhadap pasar tenaga kerja lokal. Tingginya angka kelahiran, yang seringkali dipicu oleh terbatasnya akses pendidikan dan layanan kesehatan reproduksi, juga berkontribusi pada pesatnya laju pertumbuhan penduduk. Selain itu, migrasi, yang dipengaruhi oleh disparitas peluang ekonomi antara daerah asal dan tujuan, turut mempercepat proses ini (Kuncoro, 2015).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. IPM pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai alat untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara lebih holistik. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan manusia seharusnya tidak hanya dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas hidup manusia yang meliputi aspek kesehatan, pendidikan, dan penghidupan yang layak (UNDP, 2020).

Keunikan IPM terletak pada pendekatannya yang komprehensif, mencakup dimensi non-ekonomi seperti kesehatan dan pendidikan, yang membedakannya dari indikator pembangunan lainnya. IPM juga memungkinkan perbandingan tingkat pembangunan antarnegara atau antarwilayah dan bersifat dinamis, mencerminkan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Selain itu, IPM sangat sensitif terhadap ketimpangan sosial dan ekonomi, yang sering terlihat dalam perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan (Bappenas, 2021).

Beberapa faktor yang mempengaruhi IPM antara lain adalah kualitas dan akses terhadap layanan kesehatan, yang berpengaruh langsung pada angka harapan hidup, serta kualitas pendidikan yang berkaitan dengan tingkat partisipasi dan fasilitas pendidikan. Pendapatan masyarakat juga memainkan peranan penting dalam IPM, karena pendapatan yang tinggi memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, tempat tinggal, dan pendidikan. Infrastruktur yang memadai, seperti akses terhadap air bersih, listrik, dan transportasi, juga turut meningkatkan kualitas hidup. Kebijakan pemerintah yang mendukung pemerataan pendidikan dan layanan kesehatan sangat penting dalam upaya meningkatkan IPM di berbagai daerah (BPS, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani et al. (2021) menunjukkan bahwa ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan di Indonesia masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan IPM, terutama di wilayah pedesaan. Sementara itu, Suryani (2022) menemukan bahwa investasi di sektor pendidikan dan kesehatan dapat mempercepat pencapaian IPM yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut UNDP (2020), pembangunan manusia tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, melainkan pada upaya pemberdayaan individu untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak. Oleh karena itu, IPM tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur hasil pembangunan, tetapi juga sebagai alat evaluasi terhadap kebijakan pembangunan yang lebih inklusif.

Upah Minimum Regional (UMR)

Upah Minimum Regional (UMR) adalah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk menentukan batas penghasilan terendah yang harus diterima oleh pekerja, guna mencukupi kebutuhan hidup yang layak (KHL). Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2022 dan merupakan bagian penting dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Penetapan UMR dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas tenaga kerja. Menurut Sukirno (2016), keberadaan upah minimum sangat penting untuk melindungi pekerja dari potensi eksploitasi, terutama di sektor formal.

Dalam pandangan teori Keynesian (1936), pemberian upah minimum yang layak dapat meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong konsumsi, dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun, pandangan ini berbanding terbalik dengan teori Mankiw (2003) yang mengemukakan bahwa kenaikan UMR yang tidak disertai dengan peningkatan produktivitas dapat menyebabkan perusahaan mengurangi tenaga kerja akibat tingginya biaya upah. Solow (dalam Sukirno, 2016) menambahkan bahwa menjaga keseimbangan antara tingkat upah dan produktivitas sangat penting agar stabilitas ekonomi tetap terjaga tanpa memicu tingginya angka pengangguran.

Ciri-ciri UMR mencakup penetapannya yang didasarkan pada KHL, sifatnya yang wajib dipatuhi oleh perusahaan, serta evaluasi dan penyesuaian setiap tahun untuk mencerminkan perubahan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Faktor yang memengaruhi UMR antara lain inflasi, yang mempengaruhi daya beli masyarakat; produktivitas tenaga kerja, yang mencerminkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output; dan kemampuan perusahaan dalam membayar upah tanpa mengorbankan daya saingnya. Di sisi lain, jika upah terlalu tinggi, hal itu dapat menurunkan permintaan tenaga kerja, sementara upah yang terlalu rendah dapat merugikan kesejahteraan pekerja (Kuncoro, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data numerik dan analisis statistik untuk menguji hipotesis, mengukur variabel, dan menemukan hubungan antar variabel melibatkan pengumpulan data yang dapat dihitung dan dianalisis secara objektif (V. Wiratna Sujarweni 2014:39). Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diolah merupakan data runtun waktu (time series) yang merupakan data periode 2010-2020. Sumber data didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis data pada penelitian ini adalah regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah metode statistik yang menganalisis hubungan antara satu variabel dependen (Y) dan dua atau lebih variabel independen (X). Metode ini digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan pengaruh variabel-variabel X dengan asumsi hubungan yang linier (Draper dan Smith, 1992). Analisis data yang dilakukan melalui langkah-langkah yang meliputi pengujian data yaitu:

1. Uji Normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residu berdistribusi normal atau tidak. Model regresi ini dapat dikatakan baik apabila memiliki residu yang berdistribusi normal. Dalam uji ini, peneliti menggunakan Kolmogrov-Smirnov Test. Adapun kriteria pengambilan keputusan yang dilakukan:
 - H_0 : Jika nilai Sig. > 0.05, H_0 diterima. Artinya residual distribusi model normal.
 - H_1 : Jika nilai Sig. < 0.05, H_0 ditolak. Artinya residual distribusi model tidak normal.
2. Uji Hipotesis adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan memutuskan untuk menerima atau menolak pernyataan tersebut (Arifin, 2017:17). Dalam pengujian hipotesis terdapat beberapa pengujian yang dilakukan diantaranya uji koefisien determinasi (R^2), uji F (pengujian simultan) dan uji t (pengujian parsial)
 - a. Uji Koefisien Determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel independen. Dalam uji koefisien determinasi digunakan R Square sebagai alat pengujian. Semakin tinggi nilai R Square maka semakin besar pula proporsi dari total variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.
 - b. Uji F adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen secara bersama sama terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengambilan keputusan yang dilakukan:
 - Terima H_0 atau tolak H_1 , Jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau jika nilai Sig. > 0.05.
 - Tolak H_0 atau terima H_1 , Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau jika nilai Sig. < 0.05.
 - c. Uji t adalah uji yang menentukan kontribusi masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Ini dilakukan dengan menguji koefisien regresi masing-masing variabel bebas untuk menentukan apakah mereka memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Adapun kriteria pengambilan keputusan yang dilakukan:
 - Terima H_0 atau tolak H_1 , Jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau jika nilai Sig. > 0.05.

Tolak H_0 atau terima H_1 , Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau jika nilai $Sig. < 0.05$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22855014
Most Extreme Differences	Absolute	.188
	Positive	.135
	Negative	-.188
Test Statistic		.188
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2tailed) sebesar $0.200 > 0,05$. Maka, residual model penelitian regresi jumlah penduduk miskin, IPM, dan UMR terhadap TPT berdistribusi normal.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.896	.803	.704	.27992

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26

Tabel *Summary* diatas menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi berganda (R) senilai 0.896 dan juga nilai koefisien determinasi berganda senilai 0.803. Artinya 80.3% jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) dapat dijelaskan melalui variasi jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia (IPM), dan jumlah upah minimum regional (UMR). Sementara sebagian lainnya sebanyak 19.7% terpengaruh oleh aspek lain yang tidak dipertimbangkan di penelitian.

3. Uji F (Pengujian Simultan)

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.915	3	.638	8.147	.015
	Residual	0.47	6	.078		
	Total	2.385	9			

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan tabel ANOVA di atas, diketahui nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $8.147 > 4.76$ dan nilai signifikansi < 0.05 yaitu 0.015 , maka dapat dikatakan jumlah penduduk miskin, indeks pembangunan manusia (IPM), dan upah minimum regional (UMR) berinteraksi secara bersamaan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Utara periode 2011-2020.

4. Uji t (Pengujian Parsial)

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	94.787	30.218		3.137	.020
	Jumlah Penduduk Miskin	.668	.228	1.039	2.925	.026
	IPM	-1.508	.465	-4.724	-3.245	.018
	UMR	5.66E-06	0	5.301	3.666	.011

Sumber: Data diolah dengan SPSS 26

Berdasarkan pengujian regresi dengan melihat tabel *Coefficient*, menunjukkan variabel jumlah penduduk miskin memiliki diketahui nilai $t_{hitung} 2.925 > t_{tabel} 1.94318$ dengan nilai signifikansi < 0.05 yaitu 0.026 , maka H_0 ditolak. Hipotesis nol tidak diterima karena ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak benar berdasarkan analisis data, yang mana positif dan signifikan antara jumlah penduduk miskin dengan TPT. Hal ini menunjukkan hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya. Selanjutnya, hal ini juga menjelaskan bahwa tingginya jumlah penduduk miskin akan meningkatkan TPT di Sumatera Utara.

Selanjutnya variable IPM menunjukkan nilai $t_{hitung} -3.245 > t_{tabel} 1.94318$ dengan nilai signifikansi < 0.05 yaitu 0.018 , maka H_0 ditolak. Hipotesis nol tidak diterima karena ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak benar berdasarkan analisis data, yang mana negatif dan signifikan antara IPM dengan TPT. Hal ini menunjukkan hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya. Selanjutnya, hal ini juga menjelaskan bahwa tingginya IPM akan menurunkan TPT di Sumatera Utara. Terakhir, variabel UMR menunjukkan nilai $t_{hitung} 3.666 > t_{tabel} 1.94318$ dengan nilai signifikansi < 0.05 yaitu 0.011 , maka H_0 ditolak. Hipotesis nol tidak diterima karena ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak benar berdasarkan analisis data, yang mana positif dan signifikan antara UMR dengan TPT. Hal ini

menunjukkan hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya. Selanjutnya, hal ini juga menjelaskan bahwa tingginya UMR akan mempengaruhi TPT di Sumatera Utara.

B. Pembahasan

1. Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap TPT

Setelah dilakukan analisa lebih lanjut jumlah penduduk miskin memberikan dampak positif secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Utara periode 2011-2020. Hasil penelitian ini selaras dengan temuan Wikhdatus dan Sardha Ardyan (2016), yang menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Artinya, semakin banyak jumlah penduduk miskin, semakin tinggi tingkat penganggurannya. Pertumbuhan penduduk cenderung meningkatkan jumlah angkatan kerja. Namun, meskipun peluang kerja bertambah, ketidakseimbangan yang terjadi dapat menyebabkan sebagian tenaga kerja kehilangan pekerjaan karena meningkatnya jumlah angkatan kerja.

2. Pengaruh IPM terhadap TPT

Menurut analisa olah data yang dilakukan, indeks pembangunan manusia (IPM) berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Utara periode 2011-2020. Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Mahroji et al. (2019), yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdhania dan Fivien (2017), yang menyimpulkan bahwa IPM berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di suatu wilayah dapat mengurangi jumlah pengangguran. Dengan demikian, kenaikan IPM juga dapat diartikan sebagai indikator perbaikan dalam pembangunan otonomi daerah.

3. Pengaruh UMR terhadap TPT

Menurut analisa olah data yang dilakukan, upah regional minimum (UMR) terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdampak positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Utara periode 2011-2020. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Khotimah (2018) dalam penelitiannya berjudul *Dampak Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja, dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di DIY tahun 2009-2015*. Penelitian tersebut mengungkapkan adanya hubungan positif dan signifikan antara variabel upah minimum regional dengan tingkat pengangguran terbuka. Temuan ini mendukung pandangan bahwa upah minimum memiliki dampak yang besar dan positif terhadap rata-rata gaji pekerja (Padel & Suman, 2017).

KESIMPULAN

Menurut hasil pembahasan, penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Jumlah penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Utara periode 2011-2020.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Utara periode 2011-2020.
3. Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Sumatera Utara periode 2011-2020.

4. Jumlah penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Regional secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumatera Utara periode 2011-2020.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. (2017). *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Penerbit Alex Media Komputindo.
- Bangun, R. (2020). Peningkatan kualitas manusia dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan di provinsi sumatera utara. *Inovasi*, 17(2), 219-229. <https://doi.org/10.33626/inovasi.v17i2.175>
- Bappenas. (2021). *Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2020*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Chicago: University of Chicago Press.
- Bintang, A. and Woyanti, N. (2018). Pengaruh pdrb, pendidikan, kesehatan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di jawa tengah (2011-2015). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 33(1). <https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.563>
- BPS. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Doeringer, P. B., & Piore, M. J. (1971). *Internal Labor Markets and Manpower Analysis*. D.C. Heath and Company.
- Draper, N.R. dan Smith, H. 1992 *Analisis Regresi Terapan Edisi Kedua B. Sumantri*. Jakarta: Gramedia Pustaka Ilmu Jakarta.
- Fitriani, A., Suryani, N., & Nurdin, M. (2021). *Tantangan Ketidakmerataan Akses Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 10(1), 45–58.
- Khotimah, Khusnul. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Angkatan Kerja dan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran di DIY (2009-2015). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Kuncoro, M. (2015). *Ekonomi Indonesia: Masalah dan Kebijakan*. UPP STIMY Yogyakarta.
- Mahroji, D., Ekonomi, J., Stie, P., & Mahdania, P. (2019). *PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI PROVINSI BANTEN. 9 (1)*.
- Mankiw, N. G. (2003). *Macroeconomics* (5th ed.). Worth Publishers.
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Macroeconomics 6th edition* (Fitria Liza dan Imam Nurmawan, Penerjemah). Jakarta : Erlangga
- Nurkse, R. (1953). Teori lingkaran setan kemiskinan (Vicious Cycle of Poverty).
- Okun, A. M. (1962). *Potential GNP: Its Measurement and Significance*. In American Statistical Association, Proceedings of the Business and Economic Statistics Section.

- Padel, A. P., & Suman, A. (2017). Dampak Upah Minimum Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2011-2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 5(11), 1–20.
- Putra, R., Asril, E., & Taslim, T. (2018). Prediksi indeks pembangunan manusia menggunakan algoritma c4.5 di kabupaten kampar. *Digital Zone Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 9(2), 204-214. <https://doi.org/10.31849/digitalzone.v9i2.1584>
- Rahakbauw, D., Sinay, L., & Enus, V. (2017). Aplikasi metode fuzzy c-means untuk menentukan tingkat pengangguran. *Barekeng Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 11(2), 95-100. <https://doi.org/10.30598/barekengvol11iss2pp95-100>
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Solow, R. M. (1956). *A Contribution to the Theory of Economic Growth*. *Quarterly Journal of Economics*, 70(1), 65–94.
- Sukirno, S. (2016). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (Edisi Revisi). Rajawali Pers.
- Suryani, D. (2022). *Investasi dalam Pendidikan dan Kesehatan untuk Peningkatan IPM di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 13(2), 123–134.
- Sutikno, B., Faruk, A., & Dwipurwani, O. (2017). Penerapan regresi data panel komponen satu arah untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. *Jurnal Matematika Integratif*, 13(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jmi.v13.n1.11383.1-10>
- Taufik, A. (2019). *Dinamika Jumlah Penduduk dan Dampaknya terhadap Ekonomi Regional*. *Jurnal Ekonomi Regional*, 15(3), 89–101.
- Todaro, M. P. (2006). *Economic Development* (8th ed.). Pearson Education.
- UNDP. (2020). *Human Development Report 2020: The Next Frontier – Human Development and the Anthropocene*. United Nations Development Programme.
- V Wiratna Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Wikhdatus Sa, N., & Sardha Ardyan, P. (2016). Analisis Pengaruh Upah Minimum Pekerja dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Tingkat Pengangguran Di Surabaya. *JEB17 Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(2), 129-146.